



DPRD Siapkan Perda Perketat Pengawasan Daycare

YOGYAKARTA, *Joglo Jogja* – Kasus kekerasan terhadap anak di tempat penitipan anak (daycare) menjadi alarm keras bagi Pemerintah Kota (Pemkot) dan DPRD Kota Yogyakarta. Menyikapi fenomena yang mencoreng citra Jogja sebagai Kota Pelajar dan Kota Layak Anak, legislatif kini tengah memasang ancang-ancang untuk memperketat aturan main melalui regulasi yang lebih spesifik. Ketua DPRD Kota Yogyakarta, FX Wisnu Sabdono Putro menegaskan, pihaknya melalui Panitia Khusus (Pansus) tengah serius

mendorong lahirnya payung hukum baru. Pilihannya ada dua, memperkuat klausul dalam Perda Kota Layak Anak atau menyusun Perda khusus terkait perlindungan perempuan dan anak. "Kawan-kawan pansus sudah menyampaikan masalah kekerasan ini masuk lebih detail. Kita ingin regulasi ini menjadi benteng agar peristiwa serupa tidak terulang lagi," ujar Wisnu saat ditemui usai jumpa pers di Mapolresta Yogyakarta, kemarin (27/4). ■ Baca DPRD... Hal II



SERIOUS: Menteri PPPA RI, Arifatul Choiri Fauzi saat jumpa pers penanganan korban daycare Little Aresha di Polresta Yogyakarta, kemarin (27/4).

DPRD Siapkan Perda Perketat Pengawasan Daycare

sambungan dari hal Joglo Jogja

Menurut Wisnu, perubahan gaya hidup masyarakat urban di Kora Yogyakarta saat ini tidak dibarengi dengan pengawasan yang ketat terhadap lembaga jasa penitipan anak. Jika dulu anak lebih banyak diasuh sendiri oleh keluarga, kini ketergantungan orang tua pada daycare sangat tinggi karena tuntutan pekerjaan.

"Faktanya sekarang anak-anak ditiptkan ke orang lain. Maka regulasinya harus kuat. Selama ini aspek perlindungan mungkin sudah ada di KUHP, tapi masalah pengawasan dan evaluasi berkala terhadap daycare itu yang belum maksimal," tegasnya.

DPRD pun memberikan sorotan tajam pada proses audit dan evaluasi terhadap tempat-tempat penitipan anak yang ada di Kota Jogja. Wisnu memastikan, pihaknya akan mengawal ketat langkah darurat yang diambil Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, yang telah menyiapkan 15 daycare rujukan

bagi para korban.

"Kami bersama teman-teman DPRD akan turun langsung menilai kelayakan 15 day care itu, Kita akan awasi betul, apalagi ini diberikan secara gratis oleh Pemkot sebagai solusi darurat. Audit terhadap tempat-tempat seperti itu harus dilakukan secara rutin, bukan sekadar administratif di awal saja," imbuh politisi PDI Perjuangan tersebut.

Ia menambahkan, fokus utama legislatif saat ini adalah memastikan adanya mekanisme pengawasan yang mendetail. Ia mengakui selama ini fungsi kontrol terhadap lembaga-lembaga tersebut masih longgar.

"Perda ini nantinya akan mengatur terkait evaluasi dan audit menyeluruh. Kalau tidak bisa masuk di Perda Kota Layak Anak, kami akan bentuk Perda Perlindungan Perempuan dan Anak yang baru. Saya kira itu jauh lebih mendesak saat ini," jelas Wisnu.

Sementara itu, Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo saat ini telah melakukan langkah sweeping besar-besaran. Dari hasil penyisiran sementara, ditemukan fakta mengejutkan. Ada 37 TPA yang berizin, namun terdapat 33 lainnya yang beroperasi tanpa izin.

Hasto memastikan Pemkot akan menanggung biaya pendampingan psikis maupun fisik bagi 53 anak yang teridentifikasi menjadi korban. Termasuk pemeriksaan tumbuh kembang dan penanganan stunting jika ditemukan dampak dari trauma yang dialami.

"Kami siapkan psikolog di tiap Puskesmas untuk mendampingi anak maupun orang tua korban yang secara psikis sangat terpukul. Tim hukum juga dibentuk agar tidak ada laporan keluarga yang terlewatkan dalam proses hukum yang sedang berjalan di kepolisian," tandas Hasto. **(eri/bid/wa)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan			

Yogyakarta, 05 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005